**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA: STUDI KUALITATIF TENTANG MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI PEKON WAY PETAI, KECAMATAN SUMBER JAYA**

**Oleh**

**DESI PUSPITASARI**

**NPM. 2416041100**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2025**

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

Pekon Way Petai yang terletak di Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, merupakan salah satu desa dengan karakteristik sosial agraris yang cukup kuat. Letaknya yang berada di kawasan dataran tinggi menjadikan desa ini memiliki potensi pertanian yang melimpah, khususnya di bidang perkebunan kopi yang menjadi komoditas unggulan masyarakat setempat. Selain kopi, masyarakat juga menanam padi, jagung, dan berbagai jenis hortikultura yang menjadi sumber pendapatan utama keluarga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung Barat tahun 2023, jumlah penduduk Pekon Way Petai mencapai sekitar 2.150 jiwa dengan komposisi sosial yang cukup beragam. Heterogenitas ini tampak dari adanya penduduk yang berasal dari latar belakang etnis berbeda-beda, seperti Lampung asli, Jawa, Sunda, dan Bali, yang kemudian membentuk kehidupan sosial yang bersifat majemuk. Keberagaman etnis ini justru memperkaya interaksi sosial masyarakat karena diikat oleh nilai-nilai tradisional yang masih dijunjung tinggi, seperti gotong royong, solidaritas, dan kebiasaan bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan bersama. Dengan demikian, Way Petai bukan hanya sekadar desa agraris, tetapi juga desa dengan kekayaan modal sosial yang potensial untuk mendorong pembangunan berbasis masyarakat.

Tradisi gotong royong masyarakat Way Petai dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika ada kegiatan pembangunan jalan desa, hampir seluruh warga secara sukarela ikut membantu tanpa mengharapkan imbalan. Begitu pula ketika musim panen tiba, warga saling membantu dalam mengolah hasil pertanian, atau ketika ada acara hajatan, warga bergotong royong menyiapkan segala keperluan bersama. Dalam konteks sosial-keagamaan, gotong royong juga tampak pada kegiatan membersihkan masjid, mendukung acara keagamaan, atau membantu keluarga yang sedang mengalami musibah. Modal sosial yang demikian kuat seharusnya dapat dijadikan dasar untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, terutama dalam forum formal seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes). Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa meskipun nilai gotong royong masih terpelihara, hal tersebut tidak serta-merta mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam forum perencanaan pembangunan desa yang bersifat resmi. Hal ini memperlihatkan adanya jurang antara tradisi partisipasi dalam kehidupan sehari-hari dengan partisipasi dalam ruang formal pembangunan.

MusrenbangDes sejatinya adalah forum yang dirancang untuk menampung aspirasi masyarakat, menyusun prioritas pembangunan, dan mengevaluasi hasil pembangunan desa yang telah berjalan. Forum ini memiliki posisi strategis karena menjadi ruang deliberasi demokratis bagi seluruh elemen masyarakat desa, mulai dari perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, kelompok perempuan, pemuda, hingga unsur warga lainnya. Forum ini dilaksanakan secara rutin setiap tahun sebagai bagian dari mekanisme pembangunan desa yang telah diatur dalam regulasi nasional. Namun, berdasarkan laporan Pemerintah Desa tahun 2023, meskipun tingkat kehadiran masyarakat dalam MusrenbangDes di Pekon Way Petai cukup tinggi, yaitu sekitar 65% dari undangan yang disebarkan, partisipasi warga masih sebatas kehadiran fisik. Banyak warga yang datang hanya sekadar memenuhi undangan tanpa benar-benar terlibat dalam diskusi, mengemukakan usulan, atau mengkritisi rencana pembangunan. Diskusi lebih sering didominasi oleh tokoh masyarakat tertentu atau aparat desa yang memiliki kedudukan sosial lebih tinggi. Akibatnya, keputusan pembangunan desa lebih cenderung bersifat top-down, bukan bottom-up sebagaimana semangat demokrasi partisipatif yang diharapkan.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai mengapa masyarakat yang selama ini dikenal menjunjung tinggi solidaritas sosial dan gotong royong justru tampak pasif ketika berada di forum resmi pembangunan. Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi ini adalah faktor internal dari masyarakat itu sendiri. Rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar warga membuat mereka tidak memahami secara utuh mekanisme MusrenbangDes, baik terkait tujuan, prosedur, maupun implikasi dari keputusan yang dihasilkan. Ketidakpahaman ini membuat warga merasa tidak percaya diri untuk berbicara di forum resmi. Mereka cenderung memilih diam karena khawatir pendapatnya dianggap tidak relevan atau bahkan bertentangan dengan pendapat tokoh berpengaruh. Budaya sungkan atau enggan berbeda pendapat dengan figur otoritatif juga memperkuat kecenderungan warga untuk bersikap pasif. Dengan demikian, partisipasi masyarakat terhambat bukan hanya oleh faktor struktural, tetapi juga oleh faktor psikologis dan kultural yang melekat dalam kehidupan sosial mereka.

Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal yang ikut memperlemah kualitas partisipasi masyarakat. Dominasi elit desa, terbatasnya akses informasi, serta kurangnya transparansi dalam proses perencanaan pembangunan desa menjadi hambatan besar bagi keterlibatan warga. Ketika informasi mengenai agenda MusrenbangDes tidak tersampaikan dengan merata, maka hanya sebagian kelompok saja yang mengetahui isu-isu strategis desa. Hal ini pada akhirnya menimbulkan kesenjangan partisipasi di mana hanya kelompok tertentu yang mampu menguasai forum, sementara kelompok lain tidak memiliki cukup pengetahuan untuk berargumen. Kondisi tersebut menimbulkan kesan bahwa forum MusrenbangDes hanyalah formalitas belaka. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh(Pakpahan et al., 2024), partisipasi yang bermakna adalah bagian integral dari proses pemberdayaan masyarakat, sehingga warga tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek aktif yang turut menentukan arah pembangunan. Dengan kata lain, MusrenbangDes baru dapat dikatakan berhasil jika benar-benar mampu menghadirkan warga dalam kapasitas yang setara, aktif, dan berdaya.

Secara normatif, kerangka hukum mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sebenarnya sudah sangat jelas. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara tegas memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, termasuk dalam aspek perencanaan pembangunan. Regulasi ini diperkuat lagi dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang mengharuskan pelibatan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Regulasi ini menekankan bahwa pembangunan desa tidak bisa diputuskan secara sepihak oleh elit atau pemerintah desa, melainkan harus berbasis pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat luas. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan besar antara aturan normatif dengan praktik yang berlangsung. Masyarakat memang diundang hadir, tetapi keterlibatan mereka masih bersifat formalitas dan bukan substantif. Sejalan dengan(Usman & Salahuddin, 2025), partisipasi masyarakat seharusnya menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa, sebab masyarakatlah yang paling memahami kebutuhan lokal mereka sendiri.

Kesenjangan antara aturan normatif dengan praktik di lapangan semakin mengemuka ketika dikaitkan dengan agenda pembangunan global. Sustainable Development Goals (SDGs) Desa yang dicanangkan pemerintah Indonesia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang inklusif, partisipatif, transparan, dan berkeadilan. Salah satu indikator keberhasilan SDGs Desa adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam MusrenbangDes. Namun, berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) tahun 2023, hanya sekitar 40% MusrenbangDes di Indonesia yang dinilai partisipatif sesuai indikator SDGs Desa. Data ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam forum perencanaan desa masih jauh dari harapan. Kondisi ini juga dialami oleh Pekon Way Petai, sehingga penting dilakukan kajian lebih dalam untuk mengetahui akar persoalan rendahnya partisipasi masyarakat agar sejalan dengan target pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana ditegaskan oleh(Faozanudin et al., 2022), MusrenbangDes bukan hanya forum administratif, melainkan juga ruang demokratis yang memiliki fungsi strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah pembangunan desa. Namun, kenyataan di lapangan sering kali memperlihatkan MusrenbangDes hanya menjadi ajang formalitas yang tidak menghadirkan dialog yang sehat antarwarga. Situasi ini memperkuat urgensi untuk melakukan kajian akademis yang mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif sekaligus menawarkan rekomendasi yang solutif.

Fenomena rendahnya partisipasi masyarakat dalam MusrenbangDes di Way Petai juga sejalan dengan temuan penelitian terdahulu di berbagai desa lain. (Poespitohadi & Florencia Ega, 2023) dalam penelitiannya di Desa Dalisodo menemukan bahwa partisipasi masyarakat masih sebatas kehadiran fisik tanpa pemahaman yang memadai mengenai substansi diskusi. Sosialisasi yang tidak merata menyebabkan banyak masyarakat tidak mengetahui tujuan maupun mekanisme MusrenbangDes, sehingga forum ini cenderung menjadi kegiatan administratif rutin ketimbang wadah deliberasi demokratis. Temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi yang bermakna hanya dapat terwujud jika ada sosialisasi dan komunikasi yang efektif dari pemerintah desa kepada masyarakat.

Sementara itu, (Akbar et al., 2018) menegaskan bahwa rendahnya pendidikan masyarakat dan komunikasi yang tidak efektif menyebabkan mereka lebih memilih menerima keputusan yang sudah ditentukan oleh aparat desa. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keterbatasan kapasitas warga menjadi salah satu faktor kunci rendahnya partisipasi aktif dalam MusrenbangDes. Tanpa adanya upaya peningkatan kapasitas melalui pendidikan politik dan penguatan literasi pembangunan, masyarakat akan terus berada pada posisi subordinat yang hanya mengikuti keputusan elit desa. Hal ini tentu saja berimplikasi pada keberlanjutan pembangunan desa karena keputusan yang diambil tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan nyata warga.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Octaningrum et al., 2024) juga menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran warga dan minimnya sosialisasi dari pemerintah desa membuat forum MusrenbangDes berjalan pasif. Ketika warga tidak menyadari pentingnya forum musyawarah pembangunan, mereka cenderung menganggap kehadiran dalam forum tersebut hanya sebagai kewajiban pembangunan, bukan sebagai kesempatan untuk menyuarakan aspirasi. Akibatnya, keputusan pembangunan yang dihasilkan tidak sepenuhnya selaras dengan kepentingan masyarakat luas. Temuan ini menegaskan pentingnya membangun kesadaran kritis masyarakat agar MusrenbangDes benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya.

Ketiga penelitian tersebut sama-sama menunjukkan adanya pola rendahnya partisipasi masyarakat dalam MusrenbangDes, meskipun masing-masing desa menghadapi konteks sosial yang berbeda. Desa Dalisodo menghadapi persoalan kurangnya sosialisasi, Desa Jatimulya terkendala rendahnya pembanguna masyarakat, sementara Desa Pintareng mengalami masalah lemahnya kesadaran warga dan komunikasi pemerintah desa. Hal ini membuktikan bahwa pemban penyebab rendahnya partisipasi sangat kontekstual, sehingga tidak bisa digeneralisasi untuk semua desa. Dengan demikian, penelitian di Pekon Way Petai menjadi relevan karena meskipun pembangu memiliki modal sosial berupa gotong royong dan solidaritas yang masih kuat, partisipasi warganya dalam MusrenbangDes tetap rendah.

Potensi besar yang dimiliki Way Petai seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih aktif dalam pembangunan desa. Solidaritas sosial dan budaya gotong royong, jika diintegrasikan dengan mekanisme formal pembangunan, dapat melahirkan model partisipasi yang lebih substansial. Namun, pertanyaan yang kemudian muncul apakah modal sosial tersebut benar-benar berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam MusrenbangDes, ataukah justru terhambat oleh dominasi elit, rendahnya kesadaran kritis warga, dan minimnya transparansi dalam proses musyawarah. Pertanyaan ini penting dijawab melalui penelitian agar dapat menemukan jawaban yang lebih kontekstual terkait dinamika sosial budaya masyarakat Way Petai.

Kajian ini menjadi penting karena dapat menjawab gap penelitian yang belum banyak menyoroti konteks sosial budaya unik di Pekon Way Petai. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademis dengan memperkaya literatur tentang dinamika partisipasi masyarakat dalam Pembangunan desa, tetapi juga memberikan kontribusi praktis. Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas MusrenbangDes agar lebih partisipatif, demokratis, dan Pembanguna terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif guna meningkatkan efektivitas Pembangunan desa berbasis partisipasi.

* 1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam MusrenbangDes di Pekon Way Petai, Kecamatan Sumber Jaya?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat dalam MusrenbangDes di Pekon Way Petai?
3. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam MusrenbangDes di Pekon Way Petai?
   1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini emban:

1. Untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam MusrenbangDes di Pekon Way Petai, Kecamatan Sumber Jaya.
2. Untuk mengidentifikasi emban-faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat dalam MusrenbangDes di Pekon Way Petai.
3. Untuk merumuskan strategi peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam MusrenbangDes di Pekon Way Petai.
   1. **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan embangunan desa. Selama ini, diskursus tentang embangunan desa lebih banyak menekankan pada aspek kebijakan dan regulasi, sementara aspek partisipasi masyarakat sering kali belum dikaji secara mendalam dalam konteks yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur dengan menghadirkan embangu empiris mengenai dinamika MusrenbangDes di Pekon Way Petai.

Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi dalam perkuliahan maupun kajian akademis lain yang membahas tentang embangunan partisipatif, demokrasi emba, serta pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mahasiswa, peneliti, maupun akademisi lainnya memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya partisipasi sebagai fondasi embangunan yang berkelanjutan.

1. Manfaat Praktis
2. Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan MusrenbangDes, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat. Pemerintah desa dapat menjadikan temuan penelitian ini sebagai dasar untuk memperbaiki strategi komunikasi, memperluas sosialisasi, serta menciptakan forum musyawarah yang lebih terbuka, inklusif, dan demokratis. Dengan demikian, MusrenbangDes tidak hanya menjadi agenda rutin embangunanve, melainkan juga forum substantif yang benar-benar menyerap aspirasi warga.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya keterlibatan aktif dalam proses embangunan desa. Dengan mengetahui emban-faktor yang menghambat maupun mendukung partisipasi, masyarakat dapat lebih memahami peran strategis mereka dalam menentukan arah embangunan. Hal ini diharapkan mampu menumbuhkan sikap kritis, rasa memiliki, serta tanggung jawab embang dalam mewujudkan embangunan desa yang lebih adil dan merata.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan atau bahan perbandingan untuk kajian serupa di masa mendatang. Hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat untuk memahami fenomena di Pekon Way Petai, tetapi juga dapat menjadi inspirasi untuk mengkaji fenomena yang sama di desa lain dengan kondisi sosial dan budaya yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini memiliki potensi untuk memperluas cakrawala pengetahuan mengenai partisipasi masyarakat dalam embangunan desa di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

Akbar, Muh. F., Suprapto, S., & Surati. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan  di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo. *Publik: Jurnal Ilmu Administrasi*.

Faozanudin, M., Sri Sulistiani, L., Tri Harsanto, B., Wanusmawatie, I., Sukarso, Paramarti Dasuki, N., Satwika Wijaya, S., Nuraini, H., Wahyuningrat, Indiahono, D., Simin, Gunarto, G., Antono, A., Noviko, S., Kurniasih, D., Israwan Setyoko, P., Retna Puspita, D., Tobirin, Safrida, … Mudis Taruna, M. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Dialetika Partisipasi Publik Dan Pembangunan*. SIP Publishing.

Octaningrum, A., Zuniati, A. R., Aulia, H. N., & Nurdin. (2024). Dinamika Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pintareng, Sulawesi Selatan. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, *6*(1). https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.228

Pakpahan, H. T., Kurniasih, S., Heryadi, D. Y., Fauziah, A., Eka Bumandava, A. P., Tahir, M. I., Andayani, Q., Fachri, A., Sumartono, E., & Ketut Budaraga, I. (2024). *Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Heipublishing. www.HeiPublishing.id

Poespitohadi, W., & Florencia Ega, T. F. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah  Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Desa. *MBI: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*.

Usman, B., & Salahuddin. (2025). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*. https://www.researchgate.net/publication/389922810